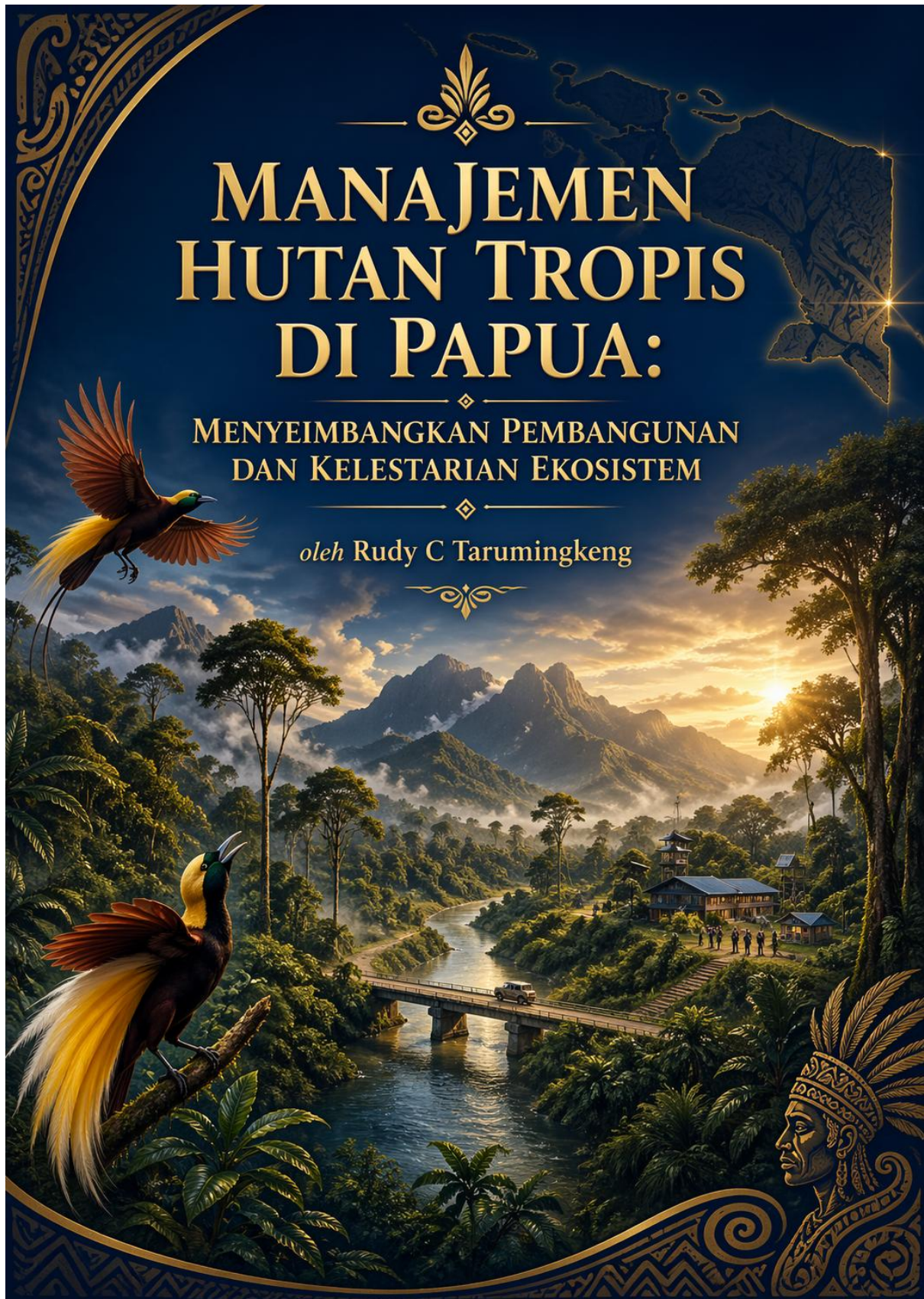




*Rudy C Tarumingkeng:* **Manajemen Hutan Tropis di Papua -  
Menyeimbangkan Pembangunan dan Kelestarian Ekosistem**

Oleh:

**Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD**

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyclt75@gmail.com](mailto:rudyclt75@gmail.com)

23 April 2026

## **MANAJEMEN HUTAN TROPIS DI PAPUA: MENYEIMBANGKAN PEMBANGUNAN DAN KELESTARIAN EKOSISTEM**

### **Abstrak**

Hutan tropis Papua menempati posisi yang sangat strategis dalam arsitektur ekologis Indonesia dan dunia. Dalam pengertian bentang ekologis "Tanah Papua" atau Indonesian New Guinea, wilayah ini masih menyimpan sekitar 34,29 juta hektare hutan pada 2019, setara 83% daratannya, mewakili 42% hutan Indonesia, sekaligus menjadi hamparan hutan tua utuh terbesar di kawasan Asia-Pasifik. Pada saat yang sama, Papua berada di persimpangan sejarah: di satu sisi terdapat tuntutan pembangunan infrastruktur, pangan, energi, dan investasi; di sisi lain terdapat kebutuhan menjaga biodiversitas, fungsi karbon, hidrologi, dan hak-hak masyarakat adat yang menjadikan hutan sebagai ruang hidup, ruang budaya, dan ruang ekonomi. Kajian ini berargumen bahwa dilema Papua bukanlah memilih pembangunan atau kelestarian, melainkan merancang model pembangunan yang tunduk pada daya dukung ekologis, keadilan tenurial, dan tata kelola partisipatif. Makalah ini menunjukkan bahwa ancaman utama terhadap hutan Papua datang dari sinergi antara ekspansi jalan, perkebunan skala besar, proyek pangan-energi, pertambangan, dan kelemahan koordinasi kelembagaan. Karena itu, keseimbangan hanya dapat dicapai melalui pengakuan wilayah adat,

penguatan perhutanan sosial, evaluasi izin berbasis bentang alam, infrastruktur berjejak ekologis rendah, pengawasan independen, serta pembiayaan pembangunan yang memberi insentif pada konservasi. Dengan pendekatan demikian, hutan Papua dapat dipandang bukan sebagai cadangan lahan kosong, melainkan sebagai modal alam strategis bagi kesejahteraan jangka panjang Indonesia. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

**Kata kunci:** *hutan tropis Papua, pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat, perhutanan sosial, biodiversitas, tata kelola hutan, konservasi*

## **Manajemen Hutan Tropis di Papua: Menyeimbangkan Pembangunan dan Kelestarian Ekosistem**

### **Pendahuluan**

Pembicaraan tentang Papua sering terjebak dalam dua bahasa yang saling berlawanan. Bahasa pertama adalah bahasa pertumbuhan: jalan harus dibangun, pangan harus diproduksi, konektivitas harus diperluas, dan investasi harus masuk. Bahasa kedua adalah bahasa penyelamatan: hutan harus dipertahankan, sungai harus dijaga, satwa endemik harus dilindungi, dan hak masyarakat adat tidak boleh dikorbankan. Kedua bahasa ini tampak seperti dua kutub yang sulit dipertemukan. Padahal, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada keberadaan dua kepentingan itu, melainkan pada kegagalan merumuskan suatu tata kelola yang mampu menempatkan pembangunan di dalam batas-batas ekologis dan etis yang jelas. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

Dalam makalah ini, istilah “Papua” digunakan terutama dalam makna bentang ekologis Tanah Papua atau Indonesian New Guinea, karena

ancaman dan peluang pengelolaan hutannya tidak mengikuti garis administrasi provinsi secara kaku. Literatur ilmiah mutakhir menunjukkan bahwa bentang ini masih merupakan salah satu kawasan hutan tropis paling utuh di dunia, tetapi tekanan dari jalan, konsesi, food estate, perkebunan industri, dan pertambangan terus meningkat. Bahkan, studi Gaveau dan kolega menunjukkan bahwa pembangunan jalan telah meningkatkan area hutan yang berisiko tinggi mengalami deforestasi sebesar 30% dibandingkan skenario jika jaringan jalan berhenti pada tingkat tahun 2000. Dalam skenario business-as-usual, kehilangan hutan sampai 2036 diproyeksikan dapat mencapai 4,5 juta hektare. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

Masalah Papua karena itu tidak dapat dibaca secara sempit sebagai konflik antara konservasionisme dan pembangunanisme. Papua adalah ujian bagi kemampuan negara dan masyarakat untuk mempraktikkan pembangunan berkelanjutan yang nyata. Ketika pemerintah berbicara tentang ketahanan pangan dan energi, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa hektare lahan yang dapat dibuka, melainkan apakah pembukaan itu kompatibel dengan karakter biofisik wilayah, apakah masyarakat adat memberi persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, dan apakah manfaat ekonominya akan lebih besar daripada kerugian ekologis serta sosial jangka panjang. Ketika pegiat konservasi berbicara tentang perlindungan hutan, pertanyaan pentingnya juga bukan sekadar bagaimana menutup ruang produksi, melainkan bagaimana memastikan masyarakat setempat memperoleh akses legal, pendapatan layak, layanan dasar, dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. ([FAOHome](http://FAOHome))

Dengan kerangka itu, makalah ini bertujuan menjelaskan signifikansi hutan tropis Papua, memetakan tekanan pembangunan yang sedang berlangsung, menganalisis kerangka hukum dan kelembagaan yang tersedia, serta menawarkan arah kebijakan untuk menyeimbangkan

pembangunan dan kelestarian ekosistem secara lebih adil dan realistis. Argumen utama makalah ini adalah bahwa masa depan hutan Papua akan sangat ditentukan oleh apakah Indonesia mampu beralih dari paradigma ekstraktif berbasis ekspansi lahan ke paradigma pembangunan bentang alam yang mengakui hutan sebagai infrastruktur ekologis dan masyarakat adat sebagai subjek utama tata kelola. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

### **Papua sebagai Bentang Hutan Tropis Strategis**

Secara ekologis, Papua bukan kawasan pinggiran. New Guinea, yang mencakup bagian Indonesia dan Papua Nugini, diakui sebagai pulau dengan flora terkaya di dunia. Artikel di *Nature* menyebut New Guinea memiliki 13.634 spesies tumbuhan vaskular, dengan 68% di antaranya endemik. Ini berarti ketika hutan Papua dibicarakan, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar tegakan pohon, melainkan suatu laboratorium evolusi raksasa yang menghasilkan keragaman hayati unik dalam skala global. Keistimewaan ini menjadikan Papua penting bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi agenda konservasi dunia. ([Nature](http://Nature))

Dari sisi tutupan hutan, pentingnya Papua makin nyata. Gaveau dan kolega memperkirakan bahwa pada 2019 masih ada sekitar 34,29 juta hektare hutan di Indonesian New Guinea, yang setara dengan 83% wilayah daratannya. Angka itu mewakili 42% hutan Indonesia dan merupakan hamparan terbesar hutan tua utuh di Asia-Pasifik. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa wilayah ini menyimpan 8,5% mangrove dunia, sementara pesisir Mimika dan Teluk Bintuni menjadi blok mangrove kontigu terbesar di Indonesia. Papua dan Papua Barat juga disebut memiliki hutan gambut utuh tersisa terbesar di Indonesia. Dengan kata lain, nilai Papua tidak hanya terletak pada hutan pegunungan dan hutan daratan rendah, tetapi juga pada mosaik ekosistem mangrove, rawa gambut, sagu, savana tergenang musiman, dan dataran aluvialnya. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

Keunikan ekologis Papua juga tercermin pada kawasan lindungnya. Taman Nasional Lorentz, misalnya, diakui UNESCO sebagai salah satu kawasan tropis langka di dunia yang membentang dari puncak bersalju hingga rawa dataran rendah dan wilayah pesisir. UNESCO mencatat 34 tipe vegetasi dan 29 sistem lahan di kawasan ini, dengan sekitar 123 spesies mamalia, termasuk monotrem seperti ekidna paruh panjang yang endemik New Guinea, serta banyak spesies burung bersebaran terbatas dan endemik. Keistimewaan Lorentz menunjukkan bahwa hutan Papua bukan hanya kaya secara horizontal, tetapi juga vertikal, karena gradien ekologisnya dari pantai ke pegunungan sangat lengkap. ([UNESCO World Heritage Centre](#))

Namun, signifikansi Papua tidak berhenti pada biodiversitas dan karbon. Hutan Papua juga memegang peran sosial-budaya yang sangat mendasar. FAO menegaskan bahwa hutan bersifat kritis bagi keberlangsungan banyak masyarakat adat karena identitas budaya, mata pencaharian, dan sistem pengetahuan mereka terikat erat dengan tanah leluhur. FAO juga menekankan bahwa strategi pengelolaan sumber daya tradisional yang telah teruji waktu memiliki peran penting dalam menjaga keragaman spesies dan ekosistem, dan bahwa pengakuan hak tenurial adat merupakan unsur penting untuk menurunkan deforestasi dan memperkuat konservasi. Bagi Papua, pernyataan ini sangat relevan, karena hubungan masyarakat adat dengan hutan bukan hubungan eksternal antara “penduduk” dan “sumber daya”, melainkan hubungan ontologis antara komunitas, leluhur, sungai, satwa, pangan, dan wilayah hidup. ([FAOHome](#))

Di sinilah hutan Papua perlu dibaca sebagai “modal alam strategis”. Modal alam bukan berarti alam yang semata-mata dinilai dengan uang, tetapi alam yang menopang keseluruhan sistem kehidupan. Bila hutan pegunungan menjaga sumber air, mangrove menjaga pesisir, rawa dan gambut menyimpan karbon, dan hutan adat menjaga ketahanan pangan lokal berbasis sagu, hasil hutan bukan kayu, perburuan tradisional, dan

pengetahuan etnobotani, maka pengelolaan hutan Papua sesungguhnya berkaitan langsung dengan daya tahan sosial-ekologis kawasan. Mengkonversi hutan dalam skala besar mungkin menghasilkan output jangka pendek, tetapi dapat sekaligus menghancurkan fondasi produktivitas jangka panjang. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

### **Tekanan Pembangunan dan Perubahan Penggunaan Lahan**

Meski masih relatif utuh dibanding banyak wilayah lain di Indonesia, Papua tidak berada dalam keadaan aman. Studi Gaveau menunjukkan bahwa selama 2001–2019 sekitar 0,75 juta hektare hutan tua di Indonesian New Guinea telah dibuka. Dari luasan itu, 45% terkait konversi yang lebih permanen ke perkebunan industri, jalan, wilayah perkotaan, tailing tambang, dan penggunaan lain; sedangkan 55% terkait proses yang lebih sementara seperti penebangan selektif, kebakaran, pertanian berpindah, perubahan badan air, serta aktivitas skala kecil lainnya. Temuan ini penting karena ia menunjukkan bahwa ancaman terhadap Papua bukan bersifat tunggal, melainkan gabungan antara konversi permanen dan degradasi berulang. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

Akan tetapi, yang paling menentukan bukan sekadar jumlah kehilangan hutan masa lalu, melainkan arah struktural perubahan. Gaveau dan kolega menegaskan bahwa variasi kehilangan hutan tahunan berkorelasi positif dengan ekspansi perkebunan industri, dan pertumbuhan jaringan jalan Trans-Papua juga berkorelasi dengan pertumbuhan perkebunan. Mereka menemukan bahwa 88% perkebunan industri baru menggantikan hutan, dan konversi ke perkebunan menyumbang 28% dari total deforestasi teramati. Dalam logika ini, jalan bukan hanya infrastruktur netral; ia adalah pembuka koridor bagi akses, spekulasi lahan, ekspansi konsesi, dan perubahan pola ekonomi dari subsisten ke pasar. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

Papua juga menghadapi tekanan sangat mutakhir dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional. Reuters melaporkan bahwa pada April 2024 pemerintah Indonesia mengidentifikasi sekitar 2 juta hektare lahan di Merauke, Papua Selatan, untuk pengembangan kawasan industri tebu, pabrik gula, bioetanol, dan pembangkit biomassa. Beberapa bulan kemudian, Reuters juga melaporkan bahwa Presiden Prabowo meninjau program food estate nasional seluas 3 juta hektare, dengan 1 juta hektare di Merauke, disertai rencana pembangunan dermaga dan jalan 135 kilometer untuk mendukung proyek tersebut. Dalam logika kebijakan nasional, proyek-proyek ini diposisikan sebagai jalan menuju swasembada. Namun, dari perspektif pengelolaan hutan, skala intervensi tersebut berarti bahwa Papua ditempatkan sebagai frontier baru perluasan lahan. ([Reuters](#))

Perkembangan terbaru di tingkat nasional memperkuat kekhawatiran itu. Reuters melaporkan pada Maret 2026 bahwa kehilangan hutan Indonesia pada 2025 melonjak 66% menjadi 433.751 hektare, tertinggi dalam delapan tahun, dan salah satu pendorong utamanya adalah dorongan swasembada pangan dan energi. Reuters juga mencatat bahwa Papua termasuk kawasan yang terpuak keras oleh lonjakan tersebut. Walaupun angka itu berskala nasional, ia menandakan bahwa perlindungan lingkungan sedang berhadapan dengan arus kebijakan produksi yang sangat kuat. Dalam konteks demikian, Papua menjadi sangat rentan karena masih memiliki bentang hutan luas yang secara politik mudah dibayangkan sebagai "cadangan lahan" untuk proyek besar. ([Reuters](#))

Data Global Forest Watch menambah dimensi spasial atas ancaman tersebut. Dashboard GFW untuk Provinsi Papua mencatat bahwa lima wilayah teratas menyumbang 51% dari seluruh kehilangan tutupan pohon antara 2001 dan 2024, dengan Merauke sebagai kabupaten dengan kehilangan terbesar, sekitar 150 ribu hektare. Sementara itu, dashboard GFW untuk Papua Barat mencatat bahwa antara 2002 dan 2024 wilayah ini

kehilangan sekitar 240 ribu hektare hutan primer lembap. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tekanan tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada simpul-simpul tertentu yang terkait dengan konektivitas, konsesi, dan ekspansi komoditas. ([globalforestwatch.org](http://globalforestwatch.org))

Selain jalan dan perkebunan, pertambangan tetap menjadi faktor penting. Studi Gaveau mencatat bahwa dampak pertambangan terhadap kehilangan hutan total memang secara persentase lebih kecil dibanding jalan dan perkebunan, tetapi konsekuensi ekologis dan manusianya tetap besar. Mereka menyoroti bahwa Grasberg, tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua, telah selama puluhan tahun melepaskan tailing dalam jumlah sangat besar ke sistem sungai yang bermuara ke Delta Aikwa di Mimika. Dengan demikian, ancaman pada hutan Papua tidak hanya berupa penebangan tegakan, melainkan juga perubahan kualitas bentang, sedimentasi, polusi, dan terganggunya sistem perairan. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

Satu dimensi lain yang sering diabaikan adalah tekanan kelembagaan pascapemekaran wilayah. WRI Indonesia menilai bahwa setelah pembentukan daerah otonomi baru pada 2022, upaya konservasi untuk mempertahankan tutupan hutan di Tanah Papua menjadi lebih tidak pasti. Bukan karena pemekaran selalu buruk, melainkan karena semakin banyak aktor, prioritas pembangunan, dan kebutuhan pendanaan yang dapat mendorong kompetisi antardaerah untuk menarik investasi jangka pendek. Jika tata ruang, data perizinan, dan standar lingkungan tidak tersinkronkan, pemekaran bisa mempercepat fragmentasi kebijakan di bentang yang secara ekologis seharusnya dikelola secara terpadu. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

### **Dilema Pembangunan di Papua: Mengapa Keseimbangan Itu Sulit?**

Kesulitan menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian di Papua bersumber dari kenyataan bahwa kedua agenda itu sama-sama memiliki

legitimasi. Tidak mungkin mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat Papua akan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, pasar, logistik, dan kesempatan ekonomi. Begitu pula, negara memiliki kewajiban memastikan ketersediaan pangan dan energi. Masalah muncul ketika pembangunan dipahami terutama sebagai ekspansi fisik dan pembukaan lahan, seolah-olah nilai ekonomi hanya lahir bila hutan diubah menjadi ladang, jalan, atau konsesi. Dalam paradigma seperti ini, hutan yang tetap berdiri dipandang kurang produktif, padahal justru ia menopang air, ikan, pangan lokal, iklim mikro, penyimpanan karbon, serta kesinambungan sosial-budaya masyarakat. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

Papua juga menampilkan paradoks klasik ekonomi sumber daya: wilayah kaya alam tetapi masyarakatnya belum otomatis sejahtera. Artikel Fatem menegaskan bahwa hutan Papua memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat, namun selama bertahun-tahun belum ada program perhutanan sosial yang benar-benar bermakna dan memberikan manfaat langsung kepada komunitas. Ungirwalu dan kolega menambahkan bahwa di Papua Barat terdapat kontras antara sumber daya alam yang melimpah dengan ketimpangan sosial serius dan kemiskinan yang terstruktur. Ini berarti bahwa eksploitasi sumber daya selama ini belum cukup berhasil diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang adil. Karena itu, menambah skala ekstraksi tanpa memperbaiki tata kelola berisiko hanya memperbesar ketimpangan lama. ([scholarhub.unhas.ac.id](http://scholarhub.unhas.ac.id))

Ada pula faktor pengetahuan ekologis. Banyak proyek besar berangkat dari peta makro nasional, bukan dari pemahaman rinci tentang sifat tanah, hidrologi, fungsi gambut, pola banjir, atau relasi masyarakat adat dengan ruang hidupnya. Ketika kebijakan pangan dibawa ke bentang yang memiliki rawa, gambut, hutan sagu, savana tergenang, dan keanekaragaman ekologi tinggi, maka pertanyaan kelayakannya tidak bisa hanya dijawab dengan logika target produksi nasional. Karena itu, problem

di Papua bukan sekadar “kurang pembangunan”, melainkan sering kali “salah bentuk pembangunan”. Kegagalan menyesuaikan instrumen pembangunan dengan karakter ekologis lokal justru dapat menghasilkan biaya ekonomi, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan yang lebih mahal. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

### **Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Papua**

Secara normatif, Indonesia sebenarnya memiliki pijakan penting untuk pengelolaan hutan yang lebih adil. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak besar karena menguji konstruksi hukum yang sebelumnya menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Dalam putusan tersebut, frasa yang diuji memperlihatkan bahwa “customary forest is state forest within the territory of customary law community” merupakan konstruksi lama yang dipersoalkan, dan Mahkamah menegaskan perlunya menempatkan hutan adat dalam otoritas masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya diakui. Putusan itu membuka jalan penting bagi pengakuan tenurial, meskipun implementasinya di lapangan tetap bergantung pada pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah, pemetaan wilayah, dan sinkronisasi administrasi. ([en.mkri.id](http://en.mkri.id))

Relevansi putusan itu bagi Papua sangat besar. Dalam banyak komunitas di Papua, hutan bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga batas genealogis, memori leluhur, dan fondasi legitimasi sosial. Karena itu, ketika negara atau perusahaan masuk tanpa kejelasan tenurial, konflik yang terjadi bukan semata sengketa tanah, melainkan benturan cara pandang tentang apa itu wilayah dan siapa yang berhak menentukan masa depannya. FAO menegaskan bahwa pengaman hak tenurial adat krusial bagi penurunan deforestasi dan konservasi yang tangguh. Maka, implementasi MK 35 di Papua bukan agenda identitas belaka, melainkan instrumen ekologis dan sosial sekaligus. ([FAOHome](http://FAOHome))

Di tingkat kebijakan regional, Deklarasi Manokwari 2018 merupakan salah satu upaya paling penting untuk menyatukan konservasi dengan pembangunan. Dokumen ini menegaskan visi “Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat”, berkomitmen mengakomodasi 70% wilayah sebagai kawasan lindung dalam penataan ruang, melindungi hak masyarakat adat, meninjau izin-izin yang telah terbit, memperkuat moratorium izin besar berbasis lahan, membangun mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta mengevaluasi dampak infrastruktur yang sudah ada dan mengarahkan pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan. Deklarasi ini penting karena ia tidak menolak pembangunan, tetapi berupaya memberi pagar ekologis dan sosial pada pembangunan. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

WRI Indonesia dan CIFOR-ICRAF menilai Deklarasi Manokwari sebagai komitmen penting menuju konservasi dan pembangunan rendah karbon yang menghormati masyarakat adat. WRI juga menyebut komitmen ini sebagai bagian dari strategi menjaga tutupan hutan yang tersisa di Tanah Papua, sejalan dengan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia. CIFOR menjelaskan bahwa pekerjaan implementasinya mencakup peninjauan tata ruang, penegakan moratorium, peninjauan izin, pengembangan tingkat emisi rujukan hutan, pemetaan gambut, dan pemberian insentif bagi praktik berkelanjutan. Artinya, deklarasi ini hanya akan bermakna jika diterjemahkan menjadi instrumen teknokratis dan fiskal yang nyata, bukan sekadar simbol politik hijau. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

Perhutanan sosial dan hutan adat kemudian menjadi arena implementasi yang sangat menentukan. Fatem menunjukkan bahwa meski Papua memiliki sumber daya hutan terbesar di Indonesia, manfaat langsung program perhutanan sosial bagi masyarakat belum terasa bermakna. Ungirwalu dan kolega menambahkan bahwa pada 2021 luasan kawasan adat yang ditetapkan di Papua Barat masih sangat rendah, hanya sekitar

2.554,2 hektare, dan ketiadaan penetapan hutan adat menjadi bentuk ketidakadilan bagi kepentingan masyarakat lokal. Temuan ini menunjukkan adanya jurang antara norma nasional yang progresif dan realisasi lapangan yang lambat. Dalam konteks Papua, kecepatan pengakuan tenurial bukan isu administratif biasa, melainkan prasyarat agar masyarakat tidak selalu berada di posisi defensif terhadap proyek-proyek besar.

([scholarhub.unhas.ac.id](http://scholarhub.unhas.ac.id))

### **Mengapa Masyarakat Adat Harus Menjadi Pusat Tata Kelola**

Salah satu kekeliruan besar dalam kebijakan kehutanan adalah memandang masyarakat adat sebagai kelompok yang harus “dilibatkan” setelah keputusan utama dibuat. Pendekatan semacam ini menganggap pusat legitimasi tetap berada di luar komunitas, sedangkan masyarakat lokal hanya diminta menyesuaikan diri. Bagi Papua, pendekatan seperti ini tidak cukup. Hutan Papua justru lebih mungkin lestari jika masyarakat adat ditempatkan sebagai pusat tata kelola, karena mereka memiliki pengetahuan ruang, sejarah penggunaan lahan, norma akses, dan kepentingan jangka panjang untuk menjaga wilayahnya tetap hidup. FAO menekankan bahwa strategi pengelolaan sumber daya tradisional yang telah teruji waktu berperan penting dalam menjaga keanekaragaman spesies dan ekosistem. ([FAOHome](http://FAOHome))

Menempatkan masyarakat adat di pusat bukan berarti menolak peran negara. Yang dibutuhkan adalah hubungan kemitraan baru. Negara menyediakan kepastian hukum, fasilitasi pemetaan, penyelesaian konflik, pengawasan terhadap aktor besar, dan standar perlindungan lingkungan. Sementara itu, masyarakat adat menyediakan legitimasi lokal, pengetahuan ekologis, mekanisme pengendalian sosial, dan praktik penggunaan hutan yang sesuai dengan konteks setempat. Dalam kerangka ini, prinsip FPIC atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan bukan sekadar prosedur formal, melainkan etika dasar pembangunan di wilayah adat. FAO

secara eksplisit menempatkan FPIC dalam pendekatan berbasis hak untuk pengelolaan sumber daya dan konservasi satwa liar. ([FAOHome](#))

Ada dimensi lain yang penting, yaitu pengawasan. FAO melaporkan bahwa pemantauan hutan independen di Indonesia dapat memperkuat tata kelola dengan melatih masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat adat, untuk mendokumentasikan dan melaporkan dugaan pelanggaran di sektor kayu. Mekanisme seperti ini relevan bagi Papua karena banyak kawasan hutan berada jauh dari pusat pengawasan formal. Jika komunitas lokal diberi pelatihan, perlindungan, dan saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran, maka biaya pengawasan menurun dan akuntabilitas meningkat. Dengan kata lain, masyarakat adat tidak hanya penting sebagai pemilik hak, tetapi juga sebagai penjaga pertama integritas bentang hutan. ([FAOHome](#))

## **Strategi Menyeimbangkan Pembangunan dan Kelestarian Ekosistem**

### **1. Menggeser paradigma dari ekspansi lahan ke pembangunan berbasis bentang alam**

Kebijakan pembangunan di Papua harus berhenti memulai perencanaan dari pertanyaan “berapa luas lahan yang tersedia”. Pertanyaan yang lebih tepat adalah “fungsi ekologis apa yang sedang bekerja di bentang ini, siapa yang bergantung padanya, dan bentuk kegiatan ekonomi apa yang kompatibel dengannya”. Pendekatan bentang alam memandang hutan, sungai, gambut, mangrove, kebun rakyat, kampung, jalan, dan kawasan lindung sebagai satu sistem yang saling memengaruhi. Ini penting terutama di Papua, tempat perubahan pada satu bagian bentang dapat menjalar ke tempat lain melalui banjir, sedimentasi, polusi, atau perubahan akses. ([global-roadmap.org](#))

Pendekatan bentang juga menolong kita melihat bahwa tidak semua pembangunan harus berbasis konversi. Sebagian pembangunan bisa

berupa peningkatan produktivitas di lahan yang sudah terbuka, penguatan rantai nilai hasil hutan bukan kayu, pengembangan sagu, perikanan berbasis ekosistem, ekowisata terbatas, agroforestri lokal, atau bioekonomi berbasis pengetahuan adat. Deklarasi Manokwari sendiri menekankan dukungan bagi produk masyarakat adat yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan dapat diolah oleh mereka sendiri, dengan akses pasar dan pembiayaan yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari dilema Papua tidak hanya berupa larangan, tetapi juga inovasi ekonomi yang tidak mensyaratkan penebangan masif. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

## **2. Mempercepat pengakuan wilayah adat dan hutan adat**

Putusan MK 35 menyediakan dasar, tetapi tanpa percepatan implementasi di daerah, masyarakat adat tetap rapuh di hadapan proyek skala besar. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah di Papua perlu mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat, pemetaan partisipatif wilayah adat, penetapan hutan adat, dan integrasinya ke dalam tata ruang. Bagi Papua, ini bukan hanya agenda hak asasi, tetapi juga agenda kepastian investasi. Investasi yang masuk ke wilayah dengan hak tak jelas justru lebih rawan konflik, biaya sosial tinggi, dan delegitimasi politik. WRI juga menekankan bahwa kejelasan tenurial penting untuk menjaga hutan sekaligus mengurangi risiko marginalisasi komunitas adat. ([en.mkri.id](#))

## **3. Menjadikan evaluasi izin dan SEA sebagai pagar sebelum proyek berjalan**

Deklarasi Manokwari dengan jelas menyebut perlunya meninjau izin yang sudah terbit serta mengevaluasi dampak infrastruktur yang ada. Ini harus diterjemahkan ke dalam praktik *Strategic Environmental Assessment* untuk proyek-proyek lintas bentang seperti food estate, koridor jalan, perkebunan tebu-bioetanol, dan kawasan industri. SEA dibutuhkan karena banyak dampak di Papua bersifat kumulatif: satu jalan mungkin tampak

kecil, tetapi ketika diikuti pemukiman, kebun industri, dan lalu lintas komoditas, hasil akhirnya adalah fragmentasi bentang. Studi Gaveau memperlihatkan bahwa sinergi antara jalan dan perkebunan itulah yang paling berbahaya. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

#### **4. Membangun infrastruktur berjejak ekologis rendah**

Papua memang membutuhkan konektivitas. Tetapi konektivitas tidak selalu identik dengan pembukaan jalan skala besar melewati kawasan sensitif. Untuk banyak wilayah, transportasi air, perbaikan pelabuhan kecil, jembatan terbatas, logistik udara perintis, dan infrastruktur digital bisa lebih sesuai daripada jalan darat yang membelah hutan primer, kawasan adat, dan habitat satwa. Bahkan pengalaman Lorentz menunjukkan bahwa pembangunan jalan tanpa kendali dapat merusak integritas kawasan bernilai universal tinggi. Pelajaran dari sini ialah bahwa infrastruktur harus dipilih bukan hanya menurut biaya konstruksi, tetapi juga menurut biaya ekologis total. ([UNESCO World Heritage Centre](#))

#### **5. Memperkuat ekonomi lokal yang tidak bergantung pada deforestasi**

Keseimbangan jangka panjang tidak akan tercapai bila masyarakat lokal hanya diberi pilihan antara menjaga hutan dan tetap miskin, atau menerima konversi hutan agar ada uang tunai masuk. Diperlukan model ekonomi yang menjadikan hutan hidup sebagai sumber nilai. Produk sagu, pala hutan, damar, madu, ikan perairan rawa, rotan, tanaman obat, kerajinan, jasa lingkungan, dan jasa wisata dapat menjadi bagian dari strategi ini. Deklarasi Manokwari menempatkan dukungan bagi produk bernilai ekonomi tinggi yang diolah masyarakat adat sebagai komitmen eksplisit. Sementara itu, CIFOR menekankan pentingnya insentif bagi praktik berkelanjutan. Artinya, desain ekonomi lokal harus menyatu dengan desain konservasi. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

#### **6. Membuka data, memperkuat pengawasan, dan menegakkan hukum**

Tanpa transparansi, perencanaan yang baik akan kalah oleh praktik di lapangan. Karena itu, informasi tentang tata ruang, izin, status kawasan, perubahan tutupan lahan, dan penyelesaian konflik harus dibuka seluas mungkin. Deklarasi Manokwari bahkan memasukkan komitmen pembentukan Komisi Informasi Papua Barat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas data lintas sektor. Pada level operasional, mekanisme pemantauan independen yang didukung FAO menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan yang efektif. Transparansi data dan pemantauan komunitas akan mengurangi ruang abu-abu yang selama ini sering dimanfaatkan oleh aktor kuat untuk bergerak lebih cepat daripada kapasitas pengawasan negara. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

## **7. Menghubungkan konservasi Papua dengan agenda iklim dan fiskal nasional**

Menjaga hutan Papua tidak boleh dibebankan hanya pada daerah dan masyarakat lokal. Papua menyediakan jasa ekologis untuk Indonesia secara keseluruhan: karbon tersimpan, kestabilan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keamanan hidrologi. Karena itu, pengelolaan hutan Papua perlu dihubungkan dengan FOLU Net Sink 2030 dan skema insentif fiskal ekologis. Deklarasi Manokwari sudah menyinggung pentingnya pembiayaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis melalui DAU, DAK, DID, Dana Otsus, dan skema lain. WRI juga menautkan upaya perlindungan Tanah Papua dengan komitmen FOLU Net Sink. Ini berarti daerah yang mempertahankan hutan seharusnya tidak dihukum oleh sistem fiskal yang terlalu bergantung pada ekspansi ekonomi ekstraktif. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

### **Narasi Kasus: Merauke sebagai Titik Uji**

Merauke memberi contoh paling jelas tentang dilema Papua masa kini. Di atas kertas, kawasan ini menawarkan ruang luas bagi proyek pangan nasional. Reuters melaporkan rencana 2 juta hektare untuk tebu, bioetanol, dan industri turunannya, serta 1 juta hektare untuk food estate dalam tahap lain. Bagi pusat, narasi yang dibangun adalah swasembada, pengurangan impor, dan peningkatan produksi nasional. Namun, dari sudut pandang ekologi bentang Papua, Merauke bukan sekadar "lahan tersedia". Ia berada dalam ekosistem selatan Papua yang mencakup hutan rawa, savana tergenang musiman, hutan sagu, dan bentang sosial masyarakat adat yang kompleks. Ketika proyek sebesar itu masuk, yang berubah bukan hanya tutupan lahan, melainkan keseluruhan relasi antara air, tanah, satwa, mobilitas manusia, dan hak ulayat. ([Reuters](#))

Studi Gaveau bahkan menunjukkan bahwa aktivitas perkebunan dari 2001 sampai 2019 lebih terkonsentrasi di Papua, khususnya terkait Merauke Integrated Food and Energy Estate, serta bahwa koridor antara Tanah Merah dan Merauke termasuk yang paling terancam dalam proyeksi kehilangan hutan hingga 2036. Di sini kita melihat bahwa proyek pangan bukan sekadar kebijakan produksi, tetapi juga produsen geografi baru: ia menciptakan jalan, menarik penduduk, mengubah nilai lahan, memicu spekulasi, dan menata ulang hubungan kuasa. Bila penataan tenurial, pemetaan adat, dan pengendalian ekologis tidak mendahului proyek, maka yang lahir adalah frontier ekstraktif baru dengan legitimasi keamanan pangan. ([global-roadmap.org](http://global-roadmap.org))

Karena itu, Merauke harus dibaca sebagai titik uji bagi masa depan pengelolaan hutan Papua. Bila Indonesia mampu memastikan evaluasi ekologis ketat, perlindungan wilayah adat, pembatasan pembukaan pada kawasan yang benar-benar sesuai, transparansi data, serta jaminan bahwa manfaat ekonomi dinikmati masyarakat lokal, maka proyek dapat diarahkan menjadi lebih bertanggung jawab. Tetapi bila target produksi

ditempatkan di atas segala hal, maka Merauke akan menjadi preseden bahwa hutan Papua dapat dikonversi besar-besaran atas nama kepentingan nasional, sekaligus melemahkan keseluruhan agenda konservasi di Tanah Papua. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

### **Menuju Model Manajemen Hutan Tropis Papua yang Berkeadilan**

Model manajemen yang dibutuhkan Papua bukan model tunggal yang seragam, melainkan arsitektur kebijakan bertingkat. Pada tingkat bentang, diperlukan perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi, koridor satwa, mangrove utama, gambut, dan hulu-hulu DAS. Pada tingkat wilayah adat, diperlukan pengakuan tenurial, peta partisipatif, dan hak veto prosedural melalui FPIC. Pada tingkat ekonomi, diperlukan dukungan pada usaha lokal yang kompatibel dengan hutan hidup. Pada tingkat birokrasi, diperlukan sinkronisasi antara kehutanan, tata ruang, infrastruktur, pertanian, energi, dan otonomi khusus. Dan pada tingkat nasional, diperlukan pembiayaan serta indikator kinerja yang menghargai konservasi, bukan hanya pertumbuhan PDRB berbasis ekstraksi. ([FAOHome](http://FAOHome))

Model ini menuntut perubahan cara pandang. Selama hutan Papua terus dibaca sebagai wilayah kosong, maka konflik akan terus berulang. Tetapi jika ia dibaca sebagai infrastruktur ekologis dan wilayah hidup masyarakat adat, maka seluruh desain pembangunan harus menyesuaikan diri. Di sini, konsep “menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian” tidak boleh dipahami sebagai kompromi setengah-setengah. Yang dibutuhkan adalah hirarki yang jelas: pertama, melindungi fungsi ekologis pokok dan hak dasar; kedua, menentukan zona pemanfaatan yang sesuai daya dukung; ketiga, memastikan manfaat ekonomi mengalir ke masyarakat lokal; dan keempat, menegakkan akuntabilitas jika terjadi pelanggaran. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

Dalam perspektif ini, keberhasilan manajemen hutan Papua seharusnya diukur bukan oleh seberapa cepat lahan dibuka, melainkan oleh seberapa baik lima hal dicapai secara serentak: tutupan hutan penting bertahan, konflik tenurial menurun, pendapatan lokal naik, biodiversitas kritis terlindungi, dan infrastruktur dasar tersedia tanpa merusak fungsi bentang. Jika satu unsur dicapai dengan mengorbankan empat unsur lain, maka itu bukan keberhasilan pembangunan, melainkan pemindahan masalah ke masa depan. ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](#))

## **Kesimpulan**

Hutan tropis Papua adalah salah satu aset paling penting yang masih dimiliki Indonesia pada abad ke-21. Ia menyimpan hutan tua dalam skala yang langka, biodiversitas kelas dunia, mangrove dan gambut penting, serta jaringan pengetahuan dan kehidupan masyarakat adat yang tidak dapat dipisahkan dari bentang hutannya. Karena itu, masa depan Papua tidak boleh ditentukan oleh logika sempit yang memandang hutan hanya sebagai cadangan ruang untuk proyek pangan, energi, jalan, atau komoditas. Papua harus dipahami sebagai bentang hidup yang membutuhkan kebijakan pembangunan dengan sensitivitas ekologis, sosial, dan historis yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah yang telah lama terdegradasi. ([global-roadmap.org](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi hutan Papua lahir dari kombinasi ekspansi jalan, perkebunan industri, proyek pangan-energi, pertambangan, lemahnya pengakuan tenurial, dan koordinasi kelembagaan yang belum memadai. Namun, makalah ini juga menunjukkan bahwa jalan keluarnya tersedia: pengakuan hutan adat pasca MK 35, implementasi serius Deklarasi Manokwari, penguatan perhutanan sosial, evaluasi izin, penggunaan SEA, pemantauan independen, transparansi data, dan insentif fiskal bagi daerah yang menjaga hutan. Dengan kata lain, keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian

bukan sesuatu yang mustahil; ia menuntut keberanian politik untuk mengganti paradigma ekstraksi cepat dengan tata kelola jangka panjang yang menghormati ekosistem dan manusia sekaligus. ([en.mkri.id](http://en.mkri.id))

Bagi Indonesia, pilihan tentang Papua pada akhirnya adalah pilihan tentang masa depan dirinya sendiri. Bila Papua dikelola dengan bijaksana, Indonesia menunjukkan bahwa negara berkembang dapat membangun tanpa menghancurkan bentang alam terakhirnya. Bila Papua dikelola secara tergesa-gesa dan eksploitatif, Indonesia justru kehilangan salah satu fondasi ekologis terpenting bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu, manajemen hutan tropis di Papua harus diletakkan sebagai agenda kebangsaan: agenda pembangunan yang adil, konservasi yang bermakna, dan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada masyarakat adat sebagai penjaga pertama hutan. ([wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org))

## **Glosarium**

**Bentang alam (landscape):** Kesatuan ruang ekologis dan sosial yang mencakup hutan, sungai, rawa, permukiman, lahan budidaya, dan infrastruktur yang saling berinteraksi.

**Biodiversitas:** Keanekaragaman kehidupan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem.

**Deforestasi:** Perubahan tutupan hutan menjadi penggunaan lahan non-hutan secara permanen atau semi permanen.

**Daya dukung ekologis:** Kemampuan suatu ekosistem menopang aktivitas manusia tanpa kehilangan fungsi pokoknya.

**FOLU Net Sink 2030:** Komitmen Indonesia agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menjadi penyerap bersih emisi pada 2030.

**FPIC (Free, Prior and Informed Consent):** Persetujuan yang diberikan secara bebas, didahulukan, dan diinformasikan oleh masyarakat terdampak sebelum suatu proyek dijalankan.

**Hutan adat:** Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya sesuai kerangka hukum Indonesia.

**Hutan tua utuh (old-growth forest):** Hutan alami yang relatif belum terganggu berat, dengan struktur dan fungsi ekologis masih dominan.

**Intact peat forest:** Hutan gambut yang masih utuh dan belum terfragmentasi atau terkonversi secara besar-besaran.

**Mangrove:** Ekosistem hutan pesisir yang berfungsi penting bagi perikanan, perlindungan pantai, dan penyimpanan karbon.

**Masyarakat adat:** Komunitas yang memiliki hubungan historis, budaya, dan kelembagaan dengan wilayah adat tertentu.

**Moratorium izin:** Penghentian sementara penerbitan izin baru untuk memberi ruang evaluasi kebijakan dan perlindungan sumber daya.

**Perhutanan sosial:** Skema kebijakan yang memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari.

**SEA/Strategic Environmental Assessment:** Kajian lingkungan hidup strategis untuk menilai dampak kumulatif dan arah kebijakan sebelum proyek dilaksanakan.

**Tutupan pohon (tree cover loss):** Indikator hilangnya penutupan tajuk pohon; tidak selalu identik dengan deforestasi permanen, tetapi berguna untuk memantau perubahan lahan.

**Wilayah adat:** Ruang hidup masyarakat adat yang mencakup tanah, hutan, perairan, dan situs budaya yang terkait dengan sejarah dan identitas komunitas.

### Daftar Pustaka (APA 7)

Cámara-Leret, R., Frodin, D. G., Adema, F., Anderson, C., Appelhans, M. S., Argent, G., ... van Welzen, P. C. (2020, February 19). *New Guinea has the world's richest island flora*. *Nature*. ([Nature](#))

CIFOR-ICRAF. (n.d.). *A scientific advocacy support mechanism for sustainable development in Papua and West Papua*. ([CIFOR-ICRAF](#))

Fatem, S. M. (2019). *Connecting social forestry to conservation policies in Tanah Papua*. *Forest and Society*, 3(1), 141–147.  
<https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5865> ([scholarhub.unhas.ac.id](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). *Indigenous Peoples and traditional forest-related knowledge*. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020, December 14). *Inclusive independent forest monitoring bolsters good forest governance: Indonesian CSOs empower forest communities to monitor resources*. ([FAOHome](#))

Gaveau, D. L. A., Santos, L., Locatelli, B., Salim, M. A., Husnayaen, H., Meijaard, E., Heatubun, C. D., & Sheil, D. (2021). *Forest loss in Indonesian New Guinea (2001–2019): Trends, drivers and outlook*. *Biological Conservation*, 261, 109225. ([global-roadmap.org](#))

Global Forest Watch. (n.d.). *Papua, Indonesia deforestation rates & statistics*. ([globalforestwatch.org](#))

Global Forest Watch. (n.d.). *Papua Barat, Indonesia deforestation rates & statistics.* ([globalforestwatch.org](https://globalforestwatch.org))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013/English translation n.d.). *Decision Number 35/PUU-X/2012.* ([en.mkri.id](https://en.mkri.id))

Reuters. (2024, April 29). *Indonesia plans to develop sugar-based industry in Papua region.* ([Reuters](https://reuters.com))

Reuters. (2024, November 3). *Indonesia's Prabowo visits Papua to check key food estate project.* ([Reuters](https://reuters.com))

Reuters. (2026, March 31). *Indonesian forest loss surges by 66% in 2025, driven by Prabowo's self-sufficiency drive, report shows.* ([Reuters](https://reuters.com))

UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Lorentz National Park.* ([UNESCO World Heritage Centre](https://unesco.org))

Ungirwalu, A., Awang, S. A., Runtuboi, Y. Y., Peday, M. Y., Marwa, J., Maitar, B., Murdjoko, A., & Fatem, S. M. (2021). *Customary forests in West Papua: Contestation of desires or needs?* *Forest and Society*, 5(2), 365–375. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13350> ([scholarhub.unhas.ac.id](https://scholarhub.unhas.ac.id))

West Papua Province & Papua Province. (2018, October 7). *Manokwari Declaration.* ([IDH - the Sustainable Trade Initiative](https://idh.org))

World Resources Institute Indonesia. (n.d.). *Protecting the landscape of Tanah Papua.* ([wri-indonesia.org](https://wri-indonesia.org))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 23 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/69ea04f0-5ef4-8398-ab3b-88852ded736e))

<https://chatgpt.com/c/69ea04f0-5ef4-8398-ab3b-88852ded736e>